

PENERAPAN PRINSIP DAN KONSEP GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
PADA PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK

Muhammad Firawan JK<sup>1</sup>, Rehanindya Krispradana<sup>2</sup>, Ahmad Fikri Al Fathoni<sup>3</sup>,  
Rohmawati Kusumaningtias<sup>4</sup>, Ambar Kusumaningsih<sup>5</sup>

Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Surabaya Jl Ketintang , Kota Surabaya, Prov.  
Jawa Timur

Email: [muhammadfirawan.23319@mhs.unesa.ac.id](mailto:muhammadfirawan.23319@mhs.unesa.ac.id)

**Abstract**

*In the face of increasingly intense global competition, the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles is crucial in modern corporate management to ensure business continuity, enhance investor confidence, and strengthen institutional integrity. This study aims to analyze the implementation of GCG principles and concepts at PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, a leading company in Indonesia's food and beverage industry, using a descriptive-quantitative method with data collected through internal questionnaires and documentation studies of annual reports and ownership structures. The GCG assessment is based on five main principles established by the National Committee on Governance Policy (KNKG), namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness and equality, with results showing that PT Garudafood has met 15 out of 17 GCG indicators, achieving a compliance index of 88.23%, reflecting strong and responsible corporate governance, including accurate financial reporting, clear organizational structure, implementation of corporate social responsibility, and the establishment of an independent supervisory committee. However, two indicators—risk management and information technology management—have yet to be fully addressed; these strategic aspects are vital in navigating complex business dynamics and require further attention to enhance governance effectiveness in the future. This study makes a significant contribution to enriching the understanding of GCG implementation in the industry sector and serves as a reference and evaluation for similar companies in developing sustainable, transparent, and accountable governance systems.***Keywords: Good Corporate Governance, Transparency, Accountability, Organizational Structure, PT Garudafood**

**Abstrak**

Dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) menjadi sangat penting dalam pengelolaan perusahaan modern untuk menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan kepercayaan investor, serta memperkuat integritas institusional. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip dan konsep GCG pada PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, salah satu perusahaan terkemuka di sektor makanan dan minuman di Indonesia, menggunakan metode deskriptif-kuantitatif dengan data dari kuesioner internal dan studi dokumentasi laporan tahunan serta struktur kepemilikan saham. Penilaian GCG didasarkan pada lima prinsip utama Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan, di mana hasil menunjukkan bahwa PT Garudafood telah memenuhi 15 dari 17 indikator GCG dengan indeks kepatuhan 88,23%,

**Article history**

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed

under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

mencerminkan tata kelola perusahaan yang kuat dan bertanggung jawab, termasuk penyediaan laporan keuangan yang akurat, struktur organisasi jelas, penerapan tanggung jawab sosial perusahaan, serta pembentukan komite pengawasan independen. Namun, terdapat dua indikator yang belum terpenuhi, yakni manajemen risiko dan pengelolaan teknologi informasi, yang merupakan aspek strategis dalam menghadapi dinamika bisnis kompleks dan perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas tata kelola di masa depan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya kajian GCG di sektor industri serta menjadi acuan bagi perusahaan sejenis dalam mengembangkan sistem tata kelola yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.

**Kata Kunci:** *Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Transparansi, Akuntabilitas, Struktur Organisasi, PT Garudafood*

## PENDAHULUAN

Dalam era bisnis modern yang semakin kompetitif dan dinamis, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi kebutuhan penting bagi perusahaan dalam menjaga keberlanjutan usaha serta meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat. Good Corporate Governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan melalui praktik tata kelola yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil.

PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di sektor industri makanan dan minuman di Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan tata kelola perusahaan berjalan secara profesional dan bertanggung jawab. Penerapan prinsip-prinsip GCG di perusahaan ini menjadi perhatian penting mengingat struktur kepemilikan perusahaan yang masih didominasi oleh pihak internal dan strategis, sehingga pengawasan dan penerapan tata kelola yang baik mutlak diperlukan untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan maupun penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan prinsip dan konsep *Good Corporate Governance* pada PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut dalam mendukung keberlangsungan dan integritas perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif berusaha untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG yang berlaku di perusahaan saat ini. Sementara pendekatan kuantitatif dilakukan melalui pengumpulan data berupa hasil kuesioner, rekapitulasi kepemilikan saham, serta pengukuran efektivitas implementasi GCG menggunakan data numerik, sehingga hasil yang diperoleh dapat diinterpretasikan secara objektif dan terukur.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi tata kelola perusahaan di PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, sekaligus menjadi bahan evaluasi serta referensi bagi perusahaan dalam memperbaiki dan menyempurnakan sistem tata kelola yang diterapkan, khususnya dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks di masa depan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Corporate Governance*

*Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur bagaimana perusahaan dikelola dan dikendalikan, melibatkan dewan direksi, pemegang saham, manajemen, dan pihak terkait lainnya. Tujuan dari tata kelola perusahaan adalah untuk menciptakan nilai jangka panjang

bagi seluruh pemangku kepentingan perusahaan serta memastikan keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan. (Sunarsih & Mardiasmo, 2018). *Corporate governance* yang baik sangat penting untuk memastikan keberhasilan perusahaan jangka panjang, meminimalkan risiko, dan meningkatkan kepercayaan investor.

Dalam konteks perusahaan manufaktur di Indonesia, *corporate governance* berpengaruh besar terhadap kualitas laporan keuangan. Tata kelola yang baik, seperti keberadaan dewan komisaris independen dan komite audit, berkontribusi dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akurat. Studi menunjukkan bahwa tata kelola yang efektif memperkuat kualitas audit, manajemen laba, dan kontrol internal perusahaan.

Dengan adanya *corporate governance* yang baik, perusahaan dapat menjaga kepercayaan investor, meminimalisir manipulasi laporan keuangan, dan meningkatkan reputasi perusahaan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang.

## Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan hubungan antara pemilik (principal) dan agen (manajemen) dalam perusahaan, yang sering kali menimbulkan konflik kepentingan. Teori ini dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dan didasarkan pada asumsi tentang kepribadian manusia, struktur organisasi, serta informasi yang tersedia. Konflik muncul karena agen, yang bertugas mengelola perusahaan, memiliki kepentingan pribadi yang bisa berbeda dari kepentingan pemilik. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan informasi, potensi kecurangan, dan manipulasi laporan keuangan agar terlihat lebih baik dari kenyataan.

Kecurangan tentunya lebih mungkin karena perbedaan kepentingan antara principal dan agen. (Triyuwono, 2018). Kecurangan lebih mungkin terjadi ketika agen merasa terdorong untuk memenuhi ekspektasi pemilik, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mencapainya. Dalam beberapa kasus, agen dapat memanipulasi laporan keuangan atau menyalahgunakan aset perusahaan untuk keuntungan pribadi, sehingga merugikan pemilik atau pemegang saham. Konflik semacam ini dapat terjadi di sektor publik maupun non-publik, sehingga untuk menghindari hal tersebut maka tata kelola yang baik dalam suatu organisasi atau perusahaan dapat sangat membantu dalam meminimalisir terjadinya konflik yang dapat mempengaruhi stabilitas organisasi (Agung, 2011). Salah satu cara untuk mengurangi konflik ini adalah dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta sistem audit yang ketat.

## Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban bagi pemegang kekuasaan dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan berbagai bentuk aktivitas yang menjadi tanggung jawab pihak pemberi wewenang (Burhanudin & Rahmawati, 2017). Prinsip ini menuntut agar perusahaan atau pemerintahan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan adil. Oleh karena itu, pengelolaan pemerintahan harus dilakukan dengan baik serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas juga merupakan syarat penting dalam mencapai kinerja yang berkelanjutan (Amalia & Widiastuti, 2020).

## Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Transparansi dalam PSAK menuntut perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang jujur, jelas, dan dapat diandalkan bagi pemangku kepentingan. Prinsip ini memastikan bahwa semua informasi material dan relevan tersedia bagi investor, kreditor, dan pihak lain yang berkepentingan guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat (Wibowo, 2022:115).

Penerapan transparansi dalam PSAK mencakup penyajian laporan keuangan sesuai standar, pengungkapan informasi signifikan seperti risiko keuangan dan kebijakan akuntansi, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang menekankan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan guna meningkatkan kepercayaan publik dan meminimalkan risiko manipulasi informasi (Siregar, 2021:87).

### **Responsibilitas (*Responsibility*)**

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance (GCG), *responsibility* adalah salah satu prinsip utama GCG yang menekankan bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatan bisnisnya dengan penuh tanggung jawab terhadap berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma etika yang relevan.

Prinsip *responsibility* menekankan pentingnya perusahaan bertanggung jawab atas setiap keputusan dan aktivitas bisnisnya, serta mempertimbangkan dampaknya bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan harus memahami implikasi dari setiap keputusan yang diambil dan menerima tanggung jawab atas tindakannya, tidak hanya demi keuntungan perusahaan semata, tetapi juga dengan menghormati hak dan kewajiban pihak lain. Penerapan prinsip ini memberikan manfaat bagi perusahaan, seperti membangun kepercayaan, membentuk citra positif, serta mengurangi risiko reputasi di tengah persaingan bisnis yang semakin terbuka. Selain itu, perusahaan juga diharapkan dapat mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam setiap keputusan bisnisnya agar dapat menjaga keberlanjutan usaha dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas.

### **Independensi (*Independency*)**

Prinsip independensi (*independency*) merupakan salah satu dari lima prinsip utama *Good Corporate Governance* (GCG) yang diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Prinsip ini menekankan pentingnya pengelolaan perusahaan secara mandiri, tanpa dominasi atau intervensi dari pihak manapun, serta bebas dari pengaruh kepentingan tertentu yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Menurut Karsono (2023), independensi didefinisikan sebagai suatu perilaku untuk terbebas dari pengaruh atau intervensi pihak lain demi menjaga objektivitas dalam menjalankan prinsip-prinsip GCG lainnya seperti akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab. Komite independen atau komisaris independen memainkan peran penting dalam menciptakan pengambilan keputusan yang adil, terutama dalam hal-hal yang menyangkut pengawasan terhadap manajemen. Penelitian ini menekankan bahwa keberadaan unsur independen dalam struktur perusahaan adalah alat krusial untuk meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap integritas perusahaan itu sendiri.

### **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**

Penerapan prinsip *fairness* mencakup pemberian kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan dan pendapat demi kepentingan perusahaan serta akses terhadap informasi sesuai prinsip transparansi. Hal ini mencerminkan upaya perusahaan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* secara adil dan setara, meskipun akses informasi tersebut belum sepenuhnya terbuka untuk publik (Estuti et al., 2022:57).

## Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan pedoman yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan bagi entitas yang memiliki tanggung jawab akuntabilitas publik. Menurut Dwi Martani (2012:15), SAK diterapkan pada perusahaan yang telah terdaftar atau sedang dalam proses pendaftaran di pasar modal, serta pada institusi yang mengelola dana masyarakat, seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun. Tujuan utama dari standar ini adalah memastikan laporan keuangan yang dihasilkan bersifat transparan, akurat, dan dapat diperbandingkan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti investor, kreditur, dan regulator dalam pengambilan keputusan ekonomi.

SAK disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang diakui secara luas dan mengikuti standar internasional, yaitu *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Dengan mengadopsi IFRS, SAK berperan dalam meningkatkan kualitas serta kredibilitas laporan keuangan di Indonesia agar sesuai dengan standar global. Hal ini menjadi semakin penting dalam era bisnis yang saling terhubung, karena laporan keuangan yang menggunakan standar internasional akan lebih mudah dipahami dan dianalisis oleh investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, penerapan SAK juga memungkinkan perbandingan laporan keuangan antar perusahaan, yang pada akhirnya meningkatkan transparansi serta kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

Seiring perkembangan ekonomi dan kebutuhan bisnis yang semakin kompleks, SAK terus mengalami revisi dan penyesuaian. Misalnya, perubahan dalam standar pelaporan keuangan mencakup penyajian aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya dengan lebih rinci serta relevan dengan kondisi ekonomi terkini. Dalam penerapannya, SAK diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, seperti SAK Umum, yang berlaku bagi entitas dengan akuntabilitas publik, serta SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang dirancang lebih sederhana untuk entitas yang tidak memiliki kewajiban pelaporan keuangan kepada publik secara luas. Selain itu, terdapat SAK Syariah, yang digunakan dalam bisnis berbasis prinsip syariah, serta SAK Berbasis IFRS, yang bertujuan menyelaraskan standar akuntansi di Indonesia dengan standar internasional.

Dalam praktiknya, penerapan SAK memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan. Standar ini membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memudahkan perusahaan dalam mengakses pendanaan dari investor asing, serta memperkuat tata kelola perusahaan (*good corporate governance*). Dengan adanya standar ini, diharapkan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan di Indonesia memiliki kualitas yang lebih baik, relevan, serta dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik objek yang diteliti, yaitu penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. Pendekatan kuantitatif dipilih karena data yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk angka, sehingga hasilnya dapat diukur dan diinterpretasikan secara objektif. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pihak internal perusahaan yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan GCG, sementara data sekunder didapatkan dari studi dokumentasi terhadap laporan tahunan, laporan keuangan, dan rekapitulasi kepemilikan saham perusahaan.

Instrumen penelitian berupa kuesioner disusun berdasarkan lima prinsip utama GCG menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Setiap prinsip diukur melalui

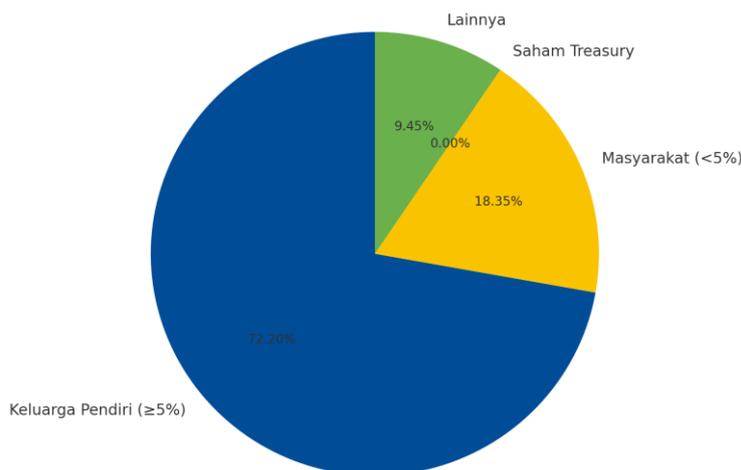
beberapa indikator dengan menggunakan skala dikotomi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan perhitungan persentase kepatuhan terhadap indikator GCG yang telah ditentukan, dan selanjutnya dihitung indeks GCG untuk mengetahui tingkat penerapan tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Hasil analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi tata kelola perusahaan saat ini serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan implementasi prinsip GCG di PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan laporan rekapitulasi saham per Desember 2024, struktur kepemilikan saham perusahaan didominasi oleh pemegang saham utama. Sebanyak 72,20% saham dikuasai oleh keluarga pendiri (pemegang saham dengan kepemilikan  $\geq 5\%$ ), sementara masyarakat (publik) dengan kepemilikan di bawah 5% memiliki porsi sebesar 18,35%. Tidak terdapat saham treasury (hasil pembelian kembali saham oleh perusahaan) pada periode tersebut. Sisanya, sebesar 9,45%, tercatat dalam kategori lainnya.

Gambar 1.1 Kepemilikan Saham PT Garudafood Putra Jaya TBK (Desember 2024)

Struktur Kepemilikan Saham PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (Desember 2024)



Sumber : Rekapitulasi Saham Desember 2024

Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar saham perusahaan masih berada di tangan pemegang saham internal dan strategis, terutama keluarga pendiri, sementara porsi kepemilikan masyarakat relatif lebih kecil. Struktur kepemilikan ini mencerminkan tingkat kontrol yang kuat dari pihak internal perusahaan, yang berpotensi mendukung stabilitas dalam pengambilan keputusan dan arah strategis perusahaan ke depan.

## Analisis Efektivitas PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk

$$\begin{aligned}
 \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi pencapaian target}}{\text{Target pencapaian perusahaan}} \times 100\% \\
 &= \frac{36.897.901.455 \text{ lembar saham}}{100.000.000.000 \text{ lembar saham}} \times 100\% \\
 &= 36,90\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan efektivitas di atas, dapat disimpulkan bahwa PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk pada tahun 2024 berhasil mencapai efektivitas sebesar 36,90% terhadap

total modal disetor yang dimiliki perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan cukup efektif dalam menjaga kepemilikan saham yang terdistribusi di pasar, sesuai dengan ketentuan dan target yang telah ditetapkan.

## **Pelaksanaan prinsip GCG pada PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk**

### **Transparansi (*Transparency*)**

PT Garudafood berkomitmen untuk menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan. Hal ini tercermin dalam publikasi rutin laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian yang dapat diakses oleh publik. Selain itu, perusahaan juga menyediakan berbagai dokumen tata kelola, seperti Pedoman Tata Kelola dan Piagam Audit Internal, yang tersedia di situs resmi perusahaan.

### **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Perusahaan menerapkan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite-komite pendukung. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi serta Piagam Audit Internal menjadi pedoman dalam memastikan akuntabilitas setiap organ perusahaan.

### **Responsibilitas (*Responsibility*)**

PT Garudafood menunjukkan tanggung jawabnya terhadap pemangku kepentingan melalui berbagai inisiatif keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dalam laporan tahunan, perusahaan menekankan pentingnya integritas dan kualitas dalam setiap layanan dan produk yang dihasilkan, mencerminkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan.

### **Independensi (*Independency*)**

Perusahaan memastikan independensi dalam pengambilan keputusan dengan membentuk struktur tata kelola yang mendukung, termasuk keberadaan Komisaris Independen dan Komite Audit yang independen. Hal ini bertujuan untuk menghindari dominasi oleh pihak tertentu dan memastikan keputusan yang diambil bebas dari benturan kepentingan.

### **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**

PT Garudafood berupaya untuk memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara. Kebijakan Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi yang diterapkan perusahaan menunjukkan komitmen terhadap prinsip kewajaran dan kesetaraan dalam menjalankan bisnis.

## Penerapan Konsep GCG

Tabel 1.1 Hasil Kuesioner PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk

No.	Indikator GCG	Ada/Tidak	Keterangan
1	Pedoman GCG (Code of Corporate Governances/CoCG)	Ada	Tersedia di situs resmi Garudafood: Pedoman Tata Kelola
2	Pedoman Benturan Kepentingan	Ada	Tersedia di situs resmi Garudafood: Pedoman Tata Kelola
3	Kebijakan Anti Penyuapan dan Anti Korupsi	Ada	Tersedia di situs resmi Garudafood: Pedoman Tata Kelola
4	Kode Etik Perusahaan	Ada	Disebutkan dalam Laporan Tahunan 2021: "Dewan Komisaris juga melaksanakan Kode Etik Perseroan sebagai bagian dari komitmen dalam melaksanakan tata kelola."
5	Pernyataan Independensi Komite Audit	Ada	Komite Audit dipimpin oleh Komisaris Independen Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, sesuai dengan peraturan OJK.
6	Kebijakan Komunikasi Dengan Pemegang Saham	Ada	Tersedia di situs resmi Garudafood: Struktur Tata Kelola
7	Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Pengawas/ Komisaris / Dewan Komisaris (Board Manual)	Ada	Tersedia di situs resmi Garudafood: Pedoman Tata Kelola
9	Piagam Satuan Pengawas Intern (SPI)	Ada	Tersedia di situs resmi Garudafood: Piagam Internal Audit
10	Kebijakan Pelaporan Atas Kepemilikan Saham	Ada	Tersedia di situs resmi Garudafood: Pedoman Tata Kelola
11	Kebijakan Prosedur Transaksi Afiliasi	Ada	Tersedia di situs resmi Garudafood: Pedoman Tata Kelola
12	Piagam Sekretaris Perusahaan	Ada	Tersedia di situs resmi Garudafood: Sekretaris Perusahaan
13	Piagam Internal Audit	Ada	Tersedia di situs resmi Garudafood: Piagam Internal Audit
14	Pedoman Sistem Pengendalian Intern	Ada	Tersedia di situs resmi Garudafood: Piagam Internal Audit
15	Pedoman Manajemen Risiko	Tidak	Tidak ditemukan dokumen khusus mengenai pedoman manajemen risiko di situs resmi atau laporan tahunan
16	Tata Cara Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan	Ada	Disebutkan dalam Laporan Tahunan 2020: "Salah satu upaya Perseroan dalam penerapan GCG adalah penerapan whistleblowing system di Perseroan."
17	Tata Kelola Teknologi Informasi.	Tidak	Tidak ditemukan dokumen khusus mengenai tata kelola teknologi informasi di situs resmi atau laporan tahunan.

Sumber : Data diolah 2025

Dari tabel diatas dapat terlihat hasil pengukuran indikator GCG yang terdapat dalam PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Indeks GCG} = 15/17 \times 100\% = 88,23 \%$$

Nilai ini menunjukkan bahwa PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk telah memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Perseroan telah menerapkan hampir seluruh indikator penting dalam tata kelola perusahaan, sehingga dapat dinilai bahwa sistem GCG di perusahaan berjalan dengan baik.

Namun demikian, untuk mencapai implementasi GCG yang lebih optimal, perusahaan disarankan segera melengkapi dua indikator yang masih belum tersedia, khususnya dalam aspek manajemen risiko dan pengelolaan teknologi informasi. Langkah ini akan mendukung kesiapan perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis serta meningkatkan kepercayaan investor dan stakeholder.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara substansial dan sistematis dalam berbagai aspek manajemen dan operasional perusahaan dengan tingkat kepatuhan sebesar 88,23%. Penerapan prinsip transparansi tercermin melalui keterbukaan informasi kepada publik, termasuk publikasi laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat, sementara akuntabilitas diwujudkan melalui struktur organisasi yang jelas serta keberadaan komite pendukung seperti Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Prinsip responsibilitas terlihat dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan perhatian

terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial, independensi dijaga oleh organ pengawas independen yang menjamin pengambilan keputusan bebas konflik kepentingan, dan kewajaran serta kesetaraan diupayakan melalui kebijakan yang melindungi hak seluruh pemangku kepentingan.

Namun demikian, penelitian menemukan dua indikator penting yang belum maksimal, yaitu penerapan manajemen risiko dan pengelolaan teknologi informasi, yang keduanya krusial untuk menghadapi tantangan bisnis yang disruptif dan kompleks ke depan. Oleh karena itu, disarankan agar PT Garudafood memperkuat kedua aspek ini untuk meningkatkan kesiapan menghadapi risiko strategis dan mendorong efisiensi operasional melalui transformasi digital. Pengembangan kebijakan GCG secara berkelanjutan, termasuk pembaruan prosedur audit internal dan peningkatan literasi tata kelola, akan memberikan nilai tambah dalam mempertahankan reputasi, kepercayaan pasar, dan kesinambungan usaha. Secara keseluruhan, penerapan GCG di PT Garudafood telah berjalan efektif dan dapat dijadikan best practice serta tolok ukur bagi perusahaan lain dalam mengembangkan sistem tata kelola yang berkualitas, beretika, dan berorientasi masa depan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. M. (2011). Konflik antar kelompok: Perspektif psikologi sosial. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2552360>
- Amalia, N., & Widiastuti, T. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan terhadap minat muzaki membayar zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(9), 1756-1769.
- Burhanudin, M. A., & Rahmawati, D. (2017). Pengaruh akuntabilitas dan independensi auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Yogyakarta. *Jurnal Profita*, 6, 1-12.
- Dwi Martani, S. V., Wardhani, R., Farahmita, A., & Tanujaya, E. (2012). Akuntansi keuangan menengah berbasis PSAK. Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat.
- Kamelia, L., Bulutoding, S. S., & Juardi, S. (2024). Akuntabilitas, transparansi, dan penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dengan etika sebagai variabel moderasi. *Islamic Accounting and Finance Review*, 5(1). <https://doi.org/10.24252/isafir.v3i2>
- Karsono, B. (2023). Good corporate governance: Transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness (Literature review). *Dinasti International Journal of Management Science*, 4(5), 850-859. <https://doi.org/10.31933/dijms.v4i5.405>
- Kurnianingsih, H. T., Rahayu, S., Nainggolan, F. R., Chandra, R., & Harahap, F. (2024). Pengaruh etika dan tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan laporan keuangan. *Brilian Dinamis Akuntansi Audit*, 6(3). <https://journalpedia.com/1/index.php/bdaa/index>
- Siregar, S. V. (2021). Good corporate governance dan kualitas pelaporan keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 80-89.
- Sufyenisa, R., & Khomsiyah. (2024). Corporate governance meningkatkan kualitas laporan keuangan pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(1), 435-442. <http://dx.doi.org/10.25105/jet.v4i1.19399>
- Sunarsih, T. N., & Mardiasmo. (2018). Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kualitas pengungkapan sustainability report. *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan*, 7(1), 19-32.
- Triyuwono, E. (2018). Proses kontrak, teori agensi, dan corporate governance. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3250329>
- Wibowo, E. (2010). Implementasi good corporate governance di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 10(2), 129-138.

- Yulia, R. A. (2023). Etika dalam perusahaan sebagai hasil dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik. *Akuntansi'45*, 4(1), 92-96.
- PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. (2023). Struktur Organisasi PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. Diakses pada 28 Mei 2025, dari <https://garudafood.com/struktur-organisasi-id>
- PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. (2019). Pedoman Kerja Direksi PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. Diakses pada 28 Mei 2025, dari file PDF Pedoman Kerja Direksi Garudafood Tbk (1).pdf
- OECD (2015). G20/OECD Principles of Corporate Governance.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2022). Pedoman Umum GCG Indonesia.